

List of Tax & Customs Regulation March Period II-2026			
No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Tentang
1	KEP-55/PJ/2026	27-Mar-26	Kebijakan perpajakan sehubungan dengan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam rangka penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2025
2	PENG-28/PJ.09/2026	27-Mar-26	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025
3	PENG-27/PJ.09/2026	26-Mar-26	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh orang pribadi utk tahun pajak 2025
4	PER-3/PJ/2026	16-Mar-26	Tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan
5	PENG-25/PJ.09/2026	10-Mar-26	Imbuan penerbitan bukti potong pajak penghasilan dalam rangka pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi melalui coretax DJP
6	PENG-20-PJ.09-2026	23-Feb-26	Penggunaan coretax form untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi status nihil
7	ND-03/PJ/PJ.09/2026	20-Feb-26	Kebijakan pelayanan selama bulan ramadan dan pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP tahun pajak 2025
8	PMK Nomor 8 Tahun 2026	11-Feb-26	Perubahan atas PMK Nomor 228/PMK.03/2017 ttg rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yg berkaitan dgn perpajakan
9	PMK Nomor 6 Tahun 2026	9-Feb-26	Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
10	PMK Nomor 5 Tahun 2026	9-Feb-26	PPN DTP dalam rangka pemberian sumbangan bencana Sumatera tahun anggaran 2026
11	PMK Nomor 4 Tahun 2026	6-Feb-26	PPN atas penyerahan jasa angkutan udara berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur idul fitri yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2026
12	PMK Nomor 1 Tahun 2026	22-Jan-26	Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan
13	PENG-1/PJ/2026	20-Jan-26	Daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan dalam rangka pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial account information/AEOI-CRS) tahun 2026
14	PER-27/PJ/2025	31-Dec-25	Pedoman pelaksanaan prosedur persetujuan bersama
15	PER-26/PJ/2025	31-Dec-25	Tata cara pelaksanaan penyitaan dan penjualan atas surat berharga berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal dalam rangka penagihan pajak
16	PMK Nomor 117 Tahun 2025	31-Dec-25	Perubahan PMK 124 Tahun 2024 ttg organisasi dan tata kerja organisasi Kemenkeu
17	17/MK/BC/2025	31-Dec-25	Pelaksanaan pengawasan ketentuan larangan impor berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 47 tahun 2025 tentang barang yang dilarang untuk diimpor
18	PER-21/BC/2025	30-Dec-25	Perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2021 tentang tata laksana pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari tempat penimbunan berikat
19	PMK Nomor 114 Tahun 2025	30-Dec-25	Perlakuan atas bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yg sifatnya wajib serta harta hibahan dalam PPh
20	PMK Nomor 113 Tahun 2025	30-Dec-25	Pengembalian cukai
21	PMK Nomor 112 Tahun 2025	30-Dec-25	Tata cara penerapan P3B
22	PMK Nomor 111 Tahun 2025	30-Dec-25	Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
23	SE-18/PJ/2025	29-Dec-25	Pedoman pelaksanaan prosedur persetujuan bersama
24	PMK Nomor 108 Tahun 2025	29-Dec-25	Petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan utk kepentingan perpajakan
25	PMK Nomor 105 Tahun 2025	29-Dec-25	PPh 21 atas penghasilan tertentu yg ditanggung Pemerintah dlm rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2026
26	PENG-54/PJ.09/2025	29-Dec-25	Batas waktu aktivasi akun coretax dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik
27	SE-20/BC/2025	29-Dec-25	Tata cara penanganan dan pelaksanaan putusan peninjauan kembali di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

28	PER-20/BC/2025	29-Dec-25	Tata cara penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan Pengangkutan barang kena cukai
29	PER-19/BC/2025	24-Dec-25	Perubahan keempat atas peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata laksana pusat logistik berikat
30	SE-16/PJ/2025	24-Dec-25	Pedoman pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
31	PMK Nomor 99 Tahun 2025	23-Dec-25	Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
32	PENG-5/PJ/2025	23-Dec-25	Imbauan antigratifikasi dalam rangka natal dan tahun baru 2026
33	PMK Nomor 98 Tahun 2025	22-Dec-25	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas
34	16/MK/BC/2025	22-Dec-25	Penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar atas produk emas yang dikenakan bea keluar
35	PMK Nomor 96 Tahun 2025	19-Dec-25	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
36	PMK Nomor 92 Tahun 2025	18-Dec-25	Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi milik Negara
37	PMK Nomor 90 Tahun 2025	18-Dec-25	PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yg di tanggung Pemerintah tahun anggaran 2026
38	PMK Nomor 89 Tahun 2025	18-Dec-25	Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
39	Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025	17-Dec-25	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
40	PENG-4/PJ/2025	17-Dec-25	Perpanjangan masa aktif kode billing untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
41	KEP-251/PJ/2025	15-Dec-25	Kebijakan administrasi perpajakan sehubungan dengan bencana alam di wilayah provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, dan provinsi Sumatera Barat tahun 2025
42	PENG-1/PAN/2025	15-Dec-25	Penyesuaian persyaratan kelengkapan administrasi upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak
43	PERMA 3 Tahun 2025	10-Dec-25	Pedoman penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan
44	PER-23/PJ/2025	9-Dec-25	Penentuan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri
45	PER-22/PJ/2025	8-Dec-25	Perubahan kelima atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-04/PJ/2022 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
46	KEP-238/BC/2025	8-Dec-25	Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanaan Tahap Ketiga
47	KEP-231/BC/2025	4-Dec-25	Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduapuluhdua
48	1467A/PAN/HK2.7/SK/XII/2025	1-Dec-25	Petunjuk pelaksanaan administrasi upaya hukum peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak yang diajukan melalui e-tax court